

**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* DAN
KEPEMILIKAN MANAJERIAL
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN**
(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat Di Bursa
Efek Indonesia Periode 2011-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

LUTVIANA PRATIWI
NIM. 12010110141196

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Lutviana Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 12010110141196

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Manajemen

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Endang Tri Widyarti, M.M

Semarang, 19 September 2014

Dosen Pembimbing,

(Dra. Hj. Endang Tri Widyarti, M.M)

NIP. 195909231986032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Lutviana Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 12010110141196
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Manajemen
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 September 2014

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Endang Tri Widyarti, M.M (.....)
2. Dr. Irene Rini Demi Pangestuti, M.E (.....)
3. Erman Denny Arfianto, S.E., M.M (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Lutviana Pratiwi, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menyatakan gagasan atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 September 2014

Yang membuat pernyataan,

(Lutviana Pratiwi)

NIM : 12010110141196

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya”.

(Al-Baqarah: 45-46)

“If you can dream it, you can do it. All our dreams can come true, if we have the courage to persue them.” (Walt Disney)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua Orang Tua yang selama ini telah mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang, dan dorongan kepada saya untuk terus berupaya sebaik mungkin dan tetap berpikir positif. Kepada Kakakku. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasinya selama ini.

ABSTRACT

This research discusses the influence of the structure of good corporate governance and managerial ownership with firm performance. Measurement method using multiple linear regression analysis to determine the structure of corporate governance has positive influence on the firm performance or not. Indicator of the structure of corporate governance used in this study is the board of size, board of commissioners, audit committee, the audit quality and managerial ownership on firm performance is measured by using ROE as a measure of firm performance based on operating companies and Tobin's Q as a measure of firm performance based market.

The sample used in this study were 156 companies that consistently registered as a company manufacturing the period of 2011 to 2013 data samples taken from the audited financial statements and annual reports that have been published. The method used in sampling is purposive sampling.

The results of this research indicate that the board of commissioners and the independent board significant positive effect on firm performance both measured by ROE and Tobin's Q. The audit committee and audit quality has no effect on firm performance, while managerial ownership significant negative effect on the market but not significant negative effect the company's operational performance.

Keywords: board of size, board of commissioner, audit committee, managerial ownership, audit quality, ROE, Tobin's Q, and firm performance

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas pengaruh antara struktur *good corporate governance* dan kepemilikan manajerial dengan kinerja perusahaan. Metode pengukuran menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui struktur *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan atau tidak. Indikator struktur *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, serta kualitas audit dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROE sebagai pengukur kinerja perusahaan berdasarkan operasional perusahaan dan Tobin's Q sebagai pengukur kinerja perusahaan berdasarkan pasar.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 156 perusahaan yang secara konsisten terdaftar sebagai perusahaan manufaktur periode tahun 2011 sampai dengan 2013. Data sampel diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan perusahaan yang telah di-publish. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris dan dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan baik diukur dengan ROE dan Tobin's Q. Komite audit dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap pasar namun berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja operasional perusahaan.

Kata Kunci : dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kualitas audit, ROE, Tobin's Q, dan kinerja perusahaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**ANALISIS PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)**” sebagai syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sangat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari pihak lain, maka skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, atas segala bantuan bimbingan serta dukungan moril yang diberikan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah mendukung setiap upaya pengembangan potensi akademik mahasiswanya.
2. Ibu Dra. Hj. Endang Tri Widayanti, M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, kritik, dan saran yang sangat berguna kepada penulis dalam

penyusunan skripsi ini selama dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

3. Bapak Drs.Ec.Ibnu Widiyanto, MA., Ph.D selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan dan nasehat selama masa perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah mendidik dan membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
5. Keluarga tercinta, Eyang dan seluruh keluarga besar mama papa, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa mendoakan, memberikan banyak nasehat dan dukungan selama ini. Sebuah anugerah terhebat yang pernah penulis miliki.
6. Kawan sejuta masa, teman belajar dan bermain sejak masa kanak-kanak, Bunga Citra, Sekar Rio, Anindita Andyawan, Windy, Dea, Vira, Aldora yang telah memberikan banyak pengalaman hidup, semangat dan motivasi untuk selalu berusaha yang terbaik.
7. Sahabat terbaik, Dhita Farissa, Nanda Fara, Windi Astriana, Ayu Pratiwi, Tito Laragatra. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, perhatian, doa yang telah diberikan dan persahabatan yang baik selama ini.
8. Teman-teman terbaik, Via Hesty, Nur Hidayati, Fatimatus, Farah, Rere, Fifi Ariestiani dan Nindy Sari. Terima kasih atas kebersamaan yang menyenangkan dan sahabat suka duka selama kuliah.

9. Teman-teman kelas C Manajemen UNDIP, Alwan, Dyan Purna, Rahman Jani, Maulana Rifqi, Deni, Gunawan, Danu, Zahra, Ulfah dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat kekeluargaan, keceriaan, dan canda tawanya selama kuliah.
10. Teman-teman D-HOUSE, Eryn, Sasha, Novita Ikbar, Wida, Fifi, Kartika Putri, Deasy Lubis, Ranella, Gaby, Debby, Luna. Terima kasih atas doa, semangat dan hari-hari yang menarik selama di kosan.
11. Teman-teman KKN II UNDIP desa Sirahan, kecamatan Salam, Magelang: Amos, Dhani, Ardian, Bang Lubis, Aji, Claudia, Anggra, Anisa dan April yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan dan pengalaman baru kepada penulis.
12. Teman-teman HMJM UNDIP yang telah memberikan banyak pengalaman organisasi yang bermanfaat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, 19 September 2014

Penulis,

(Lutviana Pratiwi)

NIM : 12010110141196

NOMENKLATUR (*Nomenclature*)

BAPEPAM	Badan Pengawas Pasar Modal
BEI	Bursa Efek Indonesia
BEJ	Bursa Efek Jakarta
CEO	<i>Chief Executive Officer</i>
CFROA	<i>Cash Flow Return On Assets</i>
CG	<i>Corporate Governance</i>
CLSA	<i>Credit Lyonnais Securities Asia</i>
FCGI	<i>Forum for Corporate Governance in Indonesia</i>
GCG	<i>Good Corporate Governance</i>
IICG	<i>The Indonesian Institute for Corporate Governance</i>
ISICOM	<i>Indonesian Society of Independent Commissioners</i>
KAP	Kantor Akuntan Publik
KAPA	Kantor Akuntan Publik Asing
KNKCG	Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance
KNKG	Komite Nasional Kebijakan Governance
OAA	Organisasi Audit Asing
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PER	<i>Price Earning Ratio</i>
PM	<i>Profit Margin</i>
ROA	<i>Return On Assets</i>
ROE	<i>Return On Equity</i>
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
NOMENKLATUR	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1.3.1 Tujuan Penelitian	16
1.3.2 Kegunaan Penelitian	16
1.4 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan Teori	19
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	19

2.1.2 <i>Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perusahaan)	22
2.1.2.1 Definisi <i>Good Corporate Governance</i>	22
2.1.2.2. Prinsip <i>Corporate Governance</i>	24
2.1.3 Indikator Struktur <i>Corporate Governance</i>	29
2.1.3.1 Dewan Komisaris	30
2.1.3.2 Dewan Komisaris Independen	33
2.1.3.3 Komite Audit	36
2.1.3.4 Kepemilikan Manajerial	38
2.1.3.5 Kualitas Audit	40
2.2 Kinerja Perusahaan	42
2.2.1 ROE (<i>Return On Equity</i>)	46
2.2.2 Tobin's Q.....	48
2.3 Penelitian Terdahulu	49
2.4 Kerangka Pemikiran.....	62
2.5 Hipotesis	70
BAB III METODE PENELITIAN	72
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	72
3.1.1 Variabel Penelitian	72
3.1.2 Definisi Operasional Variabel	72
3.2. Populasi dan Sampel	77
3.3. Jenis dan Sumber Data	78
3.4 Metode Pengumpulan data	78
3.5 Metode Analisis	78

3.5.1 Statistik Deskriptif	78
3.5.2 Model Regresi	79
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	79
3.5.3.1 Uji Multikolinearitas	80
3.5.3.2 Uji Autokorelasi	80
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas	81
3.5.3.4 Uji Normalitas	82
3.5.4 Uji Hipotesis	83
3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	83
3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)..	84
3.5.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	84
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	86
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	86
4.2 Analisis Data	87
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif	88
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	91
4.2.2.1 Uji Normalitas	91
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas	96
4.2.2.3 Uji Uji Heteroskedastisitas	97
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	99
4.2.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	100
4.2.3.1 Model ROE	101
4.2.3.2 Model Tobin's Q	101

4.2.4 Uji Hipotesis	101
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	101
4.2.4.2 Uji Statistik t	102
4.2.4.3 Uji F	103
4.2.5 Hasil Pengujian Hipotesis	104
4.2.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis ROE	106
4.2.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Tobin's Q.....	106
4.3 Interpretasi Hasil	108
BAB V PENUTUP.....	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Keterbatasan Penelitian	118
5.3 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	129

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peringkat Corporate Governance di Negara – Negara ASEAN	7
Tabel 1.2 Research Gap	13
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	57
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	76
Tabel 3.2 Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson (DW)	81
Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian	87
Table 4.2 Statistik Deskriptif	88
Tabel 4.3 Identifikasi outlier	91
Tabel 4.4 Identifikasi outlier kedua	92
Tabel 4.5 Uji Normalitas Multivariate	96
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas ROE dan Tobin's Q	97
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi ROE dan Tobin's Q	99
Tabel 4.8 Hasil Regresi Linier Berganda	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam <i>Two Tiers System</i> yang diadopsi oleh Indonesia	28
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	70
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas: Grafik Histogram Model 1	93
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas: Grafik Normal P-P Plot Model 1	94
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas: Grafik Histogram Model 2	94
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas: Grafik Normal P-P Plot Model 2	95
Gambar 4.5 Uji Heteroskadasitas Model ROE dan Tobin's Q	98

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN A Daftar Perusahaan Sampel	129
LAMPIRAN B Tabulasi Data	131
LAMPIRAN C Hasil Analisis Regresi	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance (GCG) telah menjadi isu yang hangat dan menarik perhatian bagi para ekonom dan para pelaku bisnis di seluruh dunia belakangan ini. Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di negara-negara Asia. Hal ini disebabkan adanya kondisi-kondisi obyektif yang relatif sama di negara-negara tersebut antara lain adanya hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar sehingga membuat negara-negara tersebut tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas (Tjager dkk., 2003).

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (The World Bank, 1998, dalam Oktapiyani, 2009). Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Johnson, dkk

(2000) dalam penelitiannya, telah menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* yang diterapkan dalam suatu negara lebih mampu menjelaskan luasnya depresiasi mata uang dan menurunnya kinerja pasar modal di negara-negara berkembang dibandingkan variabel-variabel makroekonomika, pada periode krisis.

Permasalahan *Corporate Governance* mencuat menjadi perhatian dunia setelah terungkapnya skandal keuangan (misalnya, Livent Inc., Corel Corporation, dan Nortel) di seluruh dunia dan runtuhnya lembaga-lembaga besar di Amerika Serikat (misalnya, Enron, World Com, Commerce Bank dan XL Holidays) telah menggoyahkan kepercayaan investor dalam pasar modal dan efektivitas praktek tata kelola perusahaan yang ada dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Gill dan Mathur, 2011). Hal ini memiliki dampak negatif pada nilai pasar per lembar saham dan konsekuensinya terhadap keseluruhan nilai perusahaan. Dalam skandal ini, berbagai laporan percaya bahwa dewan komisaris dan komite perusahaan tidak memiliki pengawasan yang baik pada manajemen.

Sebagai contoh, bentuk korupsi korporasi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan Enron. Enron bergerak dalam bidang listrik, gas alam, bubur kertas, kertas dan komunikasi. Skandal ini juga melibatkan salah satu Kantor Akuntan Publik *Big Five* saat itu, yaitu KAP Arthur Andersen (Sekaredi, 2011). Skandal Enron dilakukan oleh pihak eksekutif perusahaan dengan melakukan *mark-up* laba perusahaan dan menyembunyikan sejumlah utangnya. Kasus ini kemudian menyeret keterlibatan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen yang merupakan auditor Enron dan mengakibatkan Arthur

Andersen ditutup secara global. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa komite audit gagal untuk mengawasi tugas manajer secara efektif (Weiss, 2005).

Cornett, dkk (2006) mengungkapkan kajian tentang *corporate governance* yang terus meningkat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar lain seperti halnya skandal Tyco, Merck, Global Crossing dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *good corporate governance*. Perusahaan Enron (2001) dan WorldCom (2002), contohnya, memiliki non-eksekutif direktur ketika bencana itu datang. Maknanya, konsep lama *corporate governance* di Amerika tidak berdaya melindungi perusahaan-perusahaan tersebut dari kebangkrutan (Atkins 2003). Akibatnya, skandal perusahaan ini dipublikasikan dengan baik bersama dengan krisis keuangan Asia pada tahun 1997 yang telah menegaskan pentingnya praktik *good corporate governance* untuk kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Mokhtar et al., 2009).

Beberapa kasus skandal pelaporan keuangan juga terjadi di Indonesia contohnya PT. Kimia Farma Tbk. Perusahaan ini diperkirakan melakukan *mark-up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001 (Boediono, 2005). Dengan adanya kasus tersebut, sangat membuktikan bahwa penerapan *Corporate Governance* di Indonesia masih sangat lemah, karena praktik manipulasi laporan keuangan masih tetap dilakukan meskipun sudah melewati periode krisis pada tahun 1997-1998. Cadbury Report (UK) dan Treadway Report (US) secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen

puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam kurun waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*. Oleh karena itu diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan manajemen laba agar masyarakat, negara dan pihak-pihak lainnya dapat menerima informasi yang sesuai dan dapat menilai kinerja perusahaan dengan baik dari pelaporan keuangan yang bebas dari manipulasi. Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *corporate governance*.

Ciri utama dari lemahnya *corporate governance* adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak para manajer perusahaan. Jika para manajer perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor, maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanamkan (Darmawati dkk., 2004). Jika suatu perusahaan memiliki kepercayaan dari investor, maka para investor dan stakeholders lainnya tidak akan ragu untuk melakukan investasi yang akan menyebabkan nilai perusahaan akan meningkat (Che Haat, et al. 2008). Pengukuran suatu kinerja perusahaan yang baik maupun buruk dapat dilihat dari peningkatan nilai perusahaannya. Nilai perusahaan dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja suatu perusahaan di masa lampau, serta prospeknya di masa yang akan datang (Sukamulja, 2004). Kinerja perusahaan yang buruk dikarenakan tidak tercapainya efisiensi pasar sehingga peluang bisnis banyak yang hilang, sedangkan masalah keuangan pada perusahaan tersebut akan menyebar dengan

sangat cepat ke perusahaan lain, karyawan, kreditor, pemerintah, konsumen, maupun stakeholders lainnya (Che Haat, et al. 2008). Para pemegang saham mengharapkan manajemen perusahaan bertindak secara profesional dalam mengelola perusahaan dan setiap keputusan yang diambil harus didasarkan pada kepentingan para pemegang sahamnya serta sumber ekonomi yang digunakan untuk kepentingan pertumbuhan nilai perusahaan (Darmawati, dkk. 2005), tetapi seringkali manajemen sebagai pihak pengelola perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan pihak lain di dalam sebuah perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan tersebut.

Menurut Frost *et al* (dalam Che Hat, 2008), perbaikan dalam praktik tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap pengungkapan pelaporan yang lebih baik dalam suatu bisnis yang pada gilirannya nanti dapat memfasilitasi likuiditas pasar yang lebih besar dan struktur modal di pasar negara berkembang. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi investor, perusahaan asuransi, regulator, kreditor, pelanggan, karyawan dan stakeholder lainnya. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan

kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Sistem *Corporate Governance* yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (IICG).

Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) (2002) menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *corporate governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi *corporate governance* merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *corporate governance* berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *corporate governance*, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh beberapa pihak independen seperti CLSA, Mc Kinsey, Standar & Poors, mengenai penerapan *Good Corporate Governance*, posisi Indonesia masih berada di kelompok terbawah (*bottom quartile*). Saat ini perkembangan *corporate governance* di Indonesia terus berkembang dengan baik tetapi akibat lemahnya sistem politik, pelaksanaan dan budaya *corporate governance* mempengaruhi perkembangan *corporate governance* di Indonesia, laporan tentang penerapan *good corporate governance* yang diterbitkan oleh CLSA (2012) memberikan penilaian penerapan *good corporate governance* pada Negara – Negara di Asia Pasifik, memperlihatkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat paling bawah yaitu peringkat 11

dengan total skor 37 berada di bawah Philipphines yang ada di peringkat 10 dengan skor 41. Peringkat teratas diduduki oleh Singapore dengan skor 69, kemudian diikuti oleh Hongkong, Thailand, Japan, Malaysia, Taiwan, India, Korea, dan China di peringkat 9 di atas Philippines. Peringkat *Good Corporate Governance* dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Peringkat Corporate Governance di Negara – Negara ASEAN

Market ranked by Corporate Governance						
(%)	Total	CG Rules & Practi- ces	Enfor- cement	Political & Regula- tory	IGAAP	CG Culture
1. Singapore	69	68	64	73	87	54
2. Hong Kong	66	62	68	71	75	53
3. Thailand	58	62	44	54	80	50
4. = Japan	55	45	57	52	70	53
4. = Malaysia	55	52	39	63	80	38
6. Taiwan	53	50	35	56	77	46
7. India	51	49	42	56	63	43
8. Korea	49	43	39	56	75	34
9. China	45	43	33	46	70	30
10. Philippines	41	35	25	44	73	29
11. Indonesia	37	35	22	33	62	33

Sumber: Asian Corporate Governance Association (2012)

Untuk menyelesaikan masalah tersebut berbagai upaya telah dilaksanakan dalam menunjang pelaksanaan tata kelola yang baik. Organisasi–organisasi di bidang *corporate governance* juga banyak terbentuk, pada tahun 1999 Pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG)

melalui Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 tentang pembentukan KNKCG yang menerbitkan Pedoman GCG Indonesia. Pada Nopember 2004 Komite ini berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 dimana lingkup tugasnya lebih luas tidak hanya membuat kebijakan governance di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik. Hal ini berdasarkan *Principles of Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) yang mengatakan bahwa untuk menerapkan *Good Corporate Governance* yang efektif diperlukan pula penciptaan kondisi yang kondusif dari pemerintah dan masyarakat (Tim KNKG, 2006).

Dalam rangka perbaikan ekonomi di Indonesia berdiri lembaga non pemerintah yaitu komite nasional bagi pengelolaan perusahaan yang baik. Surat keputusan menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN juga membuktikan bahwa penerapan GCG diperlukan guna perbaikan ekonomi di Indonesia. Dikeluarkannya peraturan mengenai penerapan GCG pada perusahaan diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan dan kontrol dari perusahaan yang ada di Indonesia. Rujukan-rujukan tentang praktik-praktik terbaik sudah tersedia luas. Misalnya, melalui FCGI untuk rujukan praktik terbaik penerapan manajemen risiko dan komite audit serta melalui *Indonesian Society of Independent Commissioners* (ISICOM) untuk praktik terbaik fungsi dan peran komisaris independen.

Corporate governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, dkk., 2004).

Struktur *good corporate governance* memiliki beberapa indikator yang berupa ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Beberapa penelitian dilakukan untuk menguji keterkaitan antara struktur *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan (Daily et. al, 1998). *Corporate governance* tidak mempengaruhi kinerja secara langsung terutama. Di lain pihak menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performace* disebabkan oleh *poor governance*, adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan nilai/kinerja perusahaan (antara lain, Darmawati dkk, 2004; Klapper dan Love, 2002; Mitton, 2002; Van den Berghe dan Ridder (1999).

Sam'ani (2008) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksana akuntabilitas. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan

sebagai bagian dari pencapaian tujuan perusahaan. Ukuran dewan komisaris tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Peran dari dewan komisaris menjadi masalah yang diperdebatkan dari pandangan yang berbeda. (Jensen 1993; Yermack, 1996; Hermalin & Weisbach, 2003). Sementara beberapa studi telah menyarankan dewan komisaris yang lebih sedikit lebih baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Lipton & Lorsch, 1992; Jensen 1993; Yermack, 1996; ; Einsberg, Sundgren, dan Wells 1998; Barnhart & Rosenstein, 1998; Cheng, 2008). Penelitian lain menyarankan dewan komisaris yang lebih besar meningkatkan kinerja perusahaan (Kajola, 2008; Chang & Duta, 2012).

Dampak independensi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan juga masih menghasilkan beragam kesimpulan. Pelaksanaan *corporate governance*, terutama komisaris independen dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor (Trinanda, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Dulewicz (dalam Sam'ani, 2008) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris independen memiliki hubungan yang positif dengan arus kas pada total aktiva dan perputaran penjualan. Penelitian Dwivedi dan Jain (2005); Black dkk (2003) dan Yasser *et al* (2011) menemukan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba dan juga nilai perusahaan yang dihitung dengan Tobin's Q. Hal ini memberi bukti bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan. Penelitian ini juga didukung oleh Obradovich dan Gill (2013) yang menemukan bahwa komite audit mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Salah satu struktur *corporate governance* yang digunakan untuk mengurangi *agency cost* adalah dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Struktur kepemilikan dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan informasi asimetri (Itturiaga dan Sanz, 2000) dalam Faisal (2005). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu struktur untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Salah satunya kepemilikan manajerial.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu indikator penting dalam *corporate governance*, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa tidak adanya tindak kecurangan di dalam perusahaan. Menurut Dewi (2008) untuk mengurangi *agency cost* dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Dengan memberikan kesempatan manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham. Dengan keterlibatan

kepemilikan saham, manager akan bertindak secara hati-hati karena mereka ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan kepemilikan saham, manager akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan. Penelitian Hermalin dan Weisbach (1991) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan Gedajlovec et al. (2009), Uadiale (2010), Larasati (2011) dan Chen et al. (2012) menemukan tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan.

Selain dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial, yaitu kualitas audit juga tidak kalah penting menjadi indikator dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Penelitian terdahulu belum banyak mengkaitkan kualitas audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kualitas audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP *big four* dan *non big four* terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dapat mempengaruhi pandangan publik terhadap kinerja suatu perusahaan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor menawarkan berbagai tingkat kualitas audit untuk merespon adanya variasi permintaan klien terhadap kualitas audit (Watts dan Zimmerman, 1986).

Hal ini diperkuat oleh penelitian Teoh dan Wong (1993) yang berargumen bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas *earnings* yang diprosikan dengan *brand name* dan *earnings response coefficient* (ERC). Penelitian ini menilai kualitas auditor berdasarkan pengelompokan auditor *big*

four dengan *non big four*, dikarenakan salah satu KAP *big five* yaitu Arthur Andersen telah dinyatakan *collapsed*. Teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit (Lennox, 2000). Sementara beberapa seperti Brown dan Caylor (2004), telah menyimpulkan bahwa meskipun ada hubungan antara kualitas audit, tata kelola dan kinerja keuangan, pentingnya hubungan terletak di antara kualitas audit dan *dividend yield* dan tidak dengan kinerja operasional perusahaan. Di sisi lain kasus-kasus manipulasi akuntansi justru banyak dilakukan oleh kantor akuntan *big four* yang memiliki kualitas audit yang baik.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, berikut adalah ringkasan dari hasil Penelitian yang tidak konsisten:

Tabel 1.2
Research Gap

No.	Variabel	Hasil Penelitian	Peneliti
1.	Dewan Komisaris	Signifikan positif	Wardhani (2007) Kajola Sunday O (2008) Yasser, et al (2011) Fidanoski, et al (2013)
		Signifikan negatif	Obradovich dan Gill (2013)
		Tidak signifikan positif	Sekaredi (2011)
		Tidak signifikan negatif	Sanda, et al (2005) Puspitasari dan Ernawati (2010)
2.	Komisaris Independen	Signifikan positif	Lastanti (2004) Yasser, et al (2011)
		Signifikan negatif	Sekaredi (2011) Ghabayen (2012) Fidanoski, et al (2013)
		Tidak signifikan positif	Fooladi dan Shukor (2012)

		Tidak signifikan negatif	Puspitasari dan Ernawati (2010)
3.	Komite Audit	Signifikan positif	Yasser, et al (2011) Obradovich dan Gill (2013)
		Signifikan negatif	Sekaredi (2011) berdasarkan operasional
		Tidak signifikan positif	Suhardjanto dan Apreria (2010)
		Tidak signifikan negatif	Sekaredi (2011) berdasarkan pasar
4.	Kepemilikan Manajerial	Signifikan positif	Almuhdeki, Zeiton (2012)
5.	Kualitas Audit	Signifikan positif	Fooladi dan Shukor (2012)

Sumber: Rangkuman dari beberapa jurnal

Perbedaan-perbedaan hasil penelitian di atas tersebut menunjukkan bahwa dalam kenyataannya untuk menghubungkan struktur *corporate governance* dengan kinerja keuangan perusahaan tidak mudah dilakukan (Van den Berghe dan Ridder, 1999). Mitton (2002) menyatakan bahwa perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) perspektif teoritis yang diterapkan 2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, dan 4) perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas banyak ketidakkonsistenan ditemukan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan masih perlu untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi lebih dalam penganalisaan

corporate governance terhadap kinerja perusahaan sektor manufaktur secara khusus, yang ditentukan dalam variabel struktur *corporate governance* diantaranya Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan manajerial, dan Kualitas Audit. Penelitian ini menguji variabel *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan (Klapper dan Love, 2002) dan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar (Klapper dan Love, 2002; Black dkk. 2003).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul **“ANALISIS PENGARUH STRUKTUR *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011 – 2013.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat diketahui adanya *research gap* yang dapat di lihat pada tabel 1.2. *Research gap* yang terjadi adalah adanya perbedaan hasil penelitian pengaruh antara variabel independen dan dependen dari masing-masing penelitian terdahulu mengenai pengaruh struktur *corporate governance* dengan kinerja perusahaan sehingga mendorong untuk melakukan suatu penelitian yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan?

2. Bagaimana pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja perusahaan?
3. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan?
5. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap kinerja perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberi jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada, yang menjadi tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja perusahaan
4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan.
5. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap kinerja perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan sebagai hasil informasi dari berjalannya praktek *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan guna merumuskan kebijakan lebih lanjut

mengenai penerapan *corporate governance*, sehingga perusahaan dapat dikelola secara profesional menjadi perusahaan yang berkinerja tinggi.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bahan kajian mengenai kinerja perusahaan di Indonesia dalam kaitannya dengan faktor penentu investasi yaitu *corporate governance*.

3. Bagi pembaca dan peneliti

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi di dalam menambah wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan, kemudian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini. Mencakup landasan teori dan kerangka pemikiran, selanjutnya

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang variabel penelitian dan definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan metode analisis, setelah itu

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan sehingga dapat diketahui hasil analisis yang diteliti mengenai hasil pengujian hipotesis, dan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya. Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Prinsipal yang dimaksud adalah pemilik atau pemegang saham (investor) sedangkan yang dimaksud dengan agen adalah manajemen perusahaan. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Dengan adanya hubungan kontrak kedua belah pihak maka terjadinya manipulasi untuk meningkatkan utilitas masing-masing sangat mungkin terjadi (Jensen dan Meckling, 1976). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*).

Inti dari *Agency Theory* atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997). Menurut Eisenhardt (1989), teori keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu: (a) asumsi tentang sifat manusia, (b) asumsi tentang keorganisasian, dan (c) asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Agency theory muncul berkaitan dengan fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan kewenangan atas pengelolaan perusahaan kepada *professional manager*. Akibatnya, kewenangan menggunakan *resources* perusahaan sepenuhnya ada di tangan para eksekutif. Kemudian manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*Asymmetric Information*).

Asymmetric Information (AI), yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

- (a) *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- (b) *Adverse selection*, yaitu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar berdasarkan informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Dalam uraian tentang *Agency Theory* perilaku dari manajer/agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain/pemilik, dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (dalam hal ini timbul *Asymmetric Information* atau AI). Adanya AI dan *self serving behavior* pada manajer/agen, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan kebijakan yang kurang bermanfaat bagi perusahaan. Adanya kondisi ini menimbulkan tata kelola perusahaan yang kurang sehat karena tidak adanya keterbukaan dari manajemen untuk mengungkapkan hasil kinerjanya kepada prinsipal sebagai pemilik perusahaan.

Agency Theory menganalisis dan mencari solusi atas dua permasalahan yang muncul dalam hubungan antara para *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* mereka (manajemen). Berdasarkan kondisi semacam ini, dibutuhkan sistem tata kelola yang baik pada perusahaan yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) (Arifin, 2005). Menurut teori keagenan, struktur *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi masalah teori keagenan.

Dengan demikian, teori agensi memberikan dasar dari CG melalui penggunaan internal dan eksternal (Weir *et al*, 2002; Roberts *et al*, 2005).

2.1.2 Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)

2.1.2.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Perkembangan konsep *corporate governance* sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu *corporate governance* menjadi kosakata paling hangat di kalangan eksekutif bisnis. Konsep *corporate governance* muncul awal mula ketika dua pakar hukum, yaitu Adolf Augustus Berle dan Gardiner C. Means menerbitkan monograf berjudul “*The Modern Corporation and Private Property*” tentang pemisahan kepemilikan dan manajemen yang mengelola perusahaan yang ditulis pada tahun 1932, sekaligus sebagai penulis pertama tentang teori *corporate governance* (Obradovich dan Gill, 2013). Istilah *Corporate Governance* (CG) pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager dkk., 2003).

Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Banyak terdapat definisi yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang *corporate governance*, yang diberikan baik oleh perorangan (*individual*) maupun institusi (*institutional*). Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi CG, antara lain oleh FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) tahun 2000 yang mendefinisikan CG sama seperti *Cadbury Committee*, sedangkan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* atau IICG (2000) mendefinisikan CG sebagai proses dan

struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain.

Berikut beberapa definisi GCG baik menurut institusi maupun individu:

- a. FCGI mendefinisikan *corporate governance* yang disadur dari *Cadbury Committee of United Kingdom* sebagai:

“A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”

“(Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan).”

- b. Sedangkan OECD mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“One key element in improving economic efficiency and growth as well as enhancing investor confidence that involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders and also provides the structure through which the objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance.” (OECD, 2004)

- c. Pakar *corporate governance* dari Inggris, Jill Solomon dan Aris Solomon dalam bukunya *"Corporate Governance and Accountability"* (2004) mendefinisikan:

"Corporate governance is the system of checks and balances, both internal and external to companies, which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and act in a socially responsible way in all areas of their business activity."

“(corporate governance adalah sistem pengawasan dan keseimbangan baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) dan bertindak dengan tanggung jawab sosial dalam segala bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan).

Pengertian lain CG menurut Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO), *Good Corporate Governance* adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, *corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Dapat juga disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* organisasi tersebut.

2.1.2.2. Prinsip Corporate Governance

Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang

berkepentingan (*stakeholders*). Dalam praktiknya *Corporate Governance* berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya (Arifin, 2005).

Dalam kaitan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya *Corporate Governance*, maka OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) telah mengembangkan prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi dari masing-masing negara sebagaimana yang telah dijabarkan oleh *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* dalam Arafat (2008). Prinsip-prinsip tersebut yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham: Kerangka yang dibangun dalam *corporate governance* harus mampu melindungi hak-hak para pemegang saham yaitu hak untuk (a) menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan (b) mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya (c) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur (d) ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS (e) memilih anggota dewan komisaris (f) memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham: Kerangka GCG. harus menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini juga mengisyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-saham yang berada pada satu kelas, melarang praktek *insider trading* dan *self dealin*, dan mengharuskan

anggota dewan komisaris melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict interest*).

3. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan: Kerangka GCG harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder*, seperti yang ditentukan dalam undang-undang, dan mendorong kerjasama aktif antara perusahaan dengan *stakeholder* dalam rangka penciptaan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesinambungan usaha.

4. Keterbukaan dan Transparansi: Kerangka GCG harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

5. Akuntabilitas dewan komisaris: Kerangka GCG harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Pelaksanaan *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka dan mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor (Trinanda, 2010).

Prinsip-prinsip *corporate governance* memiliki tujuan atau manfaat yang sangat signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi bagi negara-negara yang sebelumnya dilanda krisis. Lemahnya penerapan *corporate governance* merupakan salah satu faktor utama pendorong keruntuhan ekonomi negara-negara korban krisis.

Emirzon (2007) menyatakan bahwa ada beberapa arti penting penerapan prinsip *corporate governance* dalam pembangunan ekonomi Indonesia:

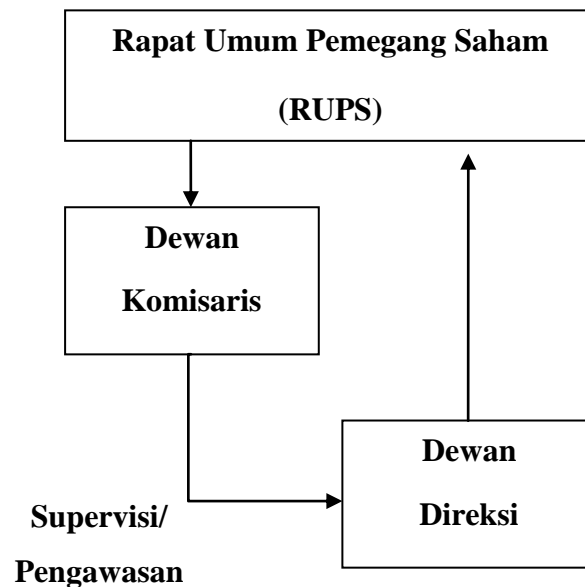
1. Pemulihan atau perbaikan keadaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
2. Menciptakan persaingan usaha yang sehat.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi sebagai akibat tumbuhnya kepercayaan investor.
4. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan hal-hal yang tidak etis dalam kegiatan ekonomi.

Terdapat dua macam struktur *corporate governance* yang berkaitan dengan struktur dewan perusahaan, pertama model *Anglo-Saxon* atau *single board model* dan yang kedua model *Continental Europe* atau *two tiers system* (FCGI, 2002). Menurut FCGI (2002), perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan *two-board system* atau *two-tier board system* seperti kebanyakan perusahaan di Eropa. *Two board system* adalah struktur *Corporate Governance* yang secara tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai eksekutif perusahaan.

Gambar 2.1

Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam *Two Tiers*

System yang diadopsi oleh Indonesia



Sumber: Forum Corporate Governance Indonesia, n.d

Menurut FCGI (2002), dalam model *two-board system* atau *two-tiers system*, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili pemegang saham untuk melakukan fungsi kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris membawahi langsung dewan direksi dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan tugas

pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan (Herwidayatmo, 2000). Dalam model ini hanya ada perbedaan dalam kedudukan dewan komisaris yang tidak langsung membawahi dewan direksi.

FCGI (2002) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang mengawal pelaksanaan strategi, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan suatu struktur mengawasi dan struktur untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Pengungkapan informasi sangat penting untuk memfasilitasi terwujudnya pengawasan eksternal mengenai ada atau tidaknya praktik-praktik pihak *insider* perusahaan serta mampu meminimalkan dampak negatif dari praktik tersebut terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Bagi pihak manajemen, informasi akan diungkapkan dalam laporan tahunan akan mempengaruhi ketidakpastian investor dalam hal pengambilan keputusan investasi. Perusahaan yang memiliki proses operasional yang efektif, kebijakan dan sistem yang berjalan sesuai dengan yang seharusnya sangat terkait dengan praktik *corporate governance*, dan diharapkan bahwa perusahaan yang memiliki struktur *corporate governance* yang baik akan semakin banyak melakukan pengungkapan (Che Haat, 2008).

2.1.3 Indikator Struktur *Corporate Governance*

Dalam mengimplementasikan *good corporate governance* dibutuhkan suatu bentuk struktur (*corporate governance mechanism*) yang dapat dipertanggungjawabkan. *Corporate governance mechanism* merupakan aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan

dengan pihak yang akan melakukan kontrol (pengawasan) terhadap keputusan tersebut yang akan menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Syakhroza, 2005). Indikator-indikator struktur *corporate governance* yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit.

2.1.3.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan laporan keuangan perusahaan yang reliable. Keberadaan dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer (Chtourou et al.,2001).

Variabilitas *corporate governance* berhubungan dengan peranan dewan komisaris dalam masalah keagenan, yang berarti bahwa variabel dewan komisaris merupakan sebuah determinan penting dalam *corporate governance* (Cheng, 2008). Keberadaan dan karakteristik dewan sebagai salah satu motor penggerak *corporate governance* akan menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan perusahaan. Indonesia merupakan negara penganut sistem *two tier*, dimana dewan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi (Wardhani, 2007).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris adalah adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*

yang berfungsi dalam monitoring kinerja manajemen, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) juga mendefinisikan Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Dewan komisaris sesuai dengan tugasnya yaitu melakukan fungsi pengawasan tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dewan komisaris dalam hal ini hanya mengambil keputusan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi (KNKG, 2006). Sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS. Jika terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan

memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap (KNKG, 2006).

Perusahaan akan bergantung pada dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. (Sutojo et. al, 2006). *Board of directors* atau dewan komisaris memiliki dua fungsi utama di dalam sebuah perusahaan. Fungsi servis berarti bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi dan nasihat kepada manajemen. Kedua, fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris (dalam teori agensi) mewakili struktur internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (FCGI, 2002). *Board of directors* atau dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* (FCGI, 2002). Oleh karena itu, peran dewan komisaris menjadi penting terkait dengan terwujudnya tata kelola perusahaan yang efektif.

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Beiner et al, 2003). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Ruvinsky, 2005). Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham. Jadi, ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham perusahaan agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan *corporate governance* dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham. Keefektifan

peran pengawasan oleh dewan komisaris ini didukung dengan keberadaan komisaris independen dalam komposisi dewan komisarisnya (FCGI, 2002).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) juga menjelaskan tentang jumlah anggota Dewan Komisaris yang harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Mengenai pemberhentian dewan komisaris juga dijelaskan yaitu pemberhentian dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada anggota dewan komisaris tersebut diberi kesempatan untuk membela diri.

2.1.3.2 Dewan Komisaris Independen

Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor I-A menjelaskan bahwa Komisaris Independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen yaitu pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa komisaris independen ini memiliki peranan dalam membatasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan manajemen dan komisaris independen ini bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penugasannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Secara langsung keberadaan Komisaris Independen menjadi penting, karena didalam

praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Komisaris independen diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yang duduk pada jajaran dewan komisaris (Sanda et al., 2005). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi. Komisaris independen dipandang sebagai posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan dengan fungsi *corporate governance* yang baik. Misi komisaris independen yaitu dijabarkan dalam tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan.

Proporsi dewan komisaris independen harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen (Antonia, 2008). Seperti pada ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT. Bursa Efek Jakarta (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan, yang menjelaskan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Perusahaan Tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris (Emirzon, 2007).

Adapun persyaratan menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut:

(1) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan; (2) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan; (3) Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat; (4) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; (5) Diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Suhardjanto dan Apreria, 2010).

Berdasarkan teori keagenan, kehadiran komisaris independen merupakan struktur yang diharapkan dapat melakukan pengawasan dan mengontrol konflik kepentingan antara *controlling shareholders* dan *minority shareholders* sehingga terjadi efisiensi dalam manajemen perusahaan. Keputusan-keputusan yang dilakukan manajemen dapat sejalan sesuai dengan tujuan, yaitu memaksimalkan kinerja perusahaan dan yang terpenting adalah dewan komisaris independen dapat menunjukkan pengaruh efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Daily dan Dalton, 1993 dalam Fidanoski, *et al.*

2013).

2.1.3.3 Komite Audit

Agency theory memprediksikan bahwa pembentukan komite audit merupakan cara untuk menyelesaikan *agency problems*. Hal ini dikarenakan fungsi utama komite audit adalah mereview pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. (Etty Retno Wulandari, 2005). Dengan membantu pembentukan pengendalian internal yang baik, komite audit dapat memperbaiki kualitas keterbukaan. Ho dan Wong (2001) membuktikan bahwa *voluntary disclosure* berasosiasi secara positif dengan keberadaan komite audit. Dengan kata lain, komite audit melayani kepentingan pemegang saham dengan melindungi hak-haknya melalui pengawasan terhadap perilaku *agent*.

Pengertian komite audit dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, tertanggal 24 September 2004 pada Peraturan nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit harus diketuai oleh seorang komisaris independen. Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *Corporate governance*. Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Komite audit beranggotakan komisaris independen (FCGI, 2001).

Komite Audit juga memainkan peran penting dalam peningkatan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang menunjukkan bahwa komite audit harus bekerja secara independen dan melakukan tugasnya secara profesional. Komite audit memonitor struktur yang meningkatkan kualitas arus informasi antara pemegang saham dan manajer (Rouf, 2011, hal.240), yang pada gilirannya, membantu meminimalkan masalah keagenan. Keberadaan komite audit pada saat ini telah diterima sebagai suatu bagian dari organisasi perusahaan (*Corporate Governance*). Bahkan untuk menilai pelaksanaan *good corporate governance* di perusahaan, adanya komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam kriteria penilaian.

Komite audit memiliki tanggungjawab yang besar dalam menyiapkan audit, melakukan ratifikasi terhadap sistem pengendalian internal, dan memecahkan perselisihan dalam peraturan akuntansi. Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Ukuran komite audit dijelaskan dalam keputusan Direksi BEJ nomor : KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Huruf C, yaitu keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi atau keuangan (dalam Nurmala *et. al*, 2007).

Suhardjanto dan Apreria (2010) mengatakan syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah independen atau tidak memiliki hubungan hubungan usaha maupun afiliasi dengan perusahaan, direktur, komisaris, maupun pemegang saham utama. Anggota komite audit juga harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.

2.1.3.4 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Saham yang diberikan kepada

manajer atau direksi merupakan insentif yang biasanya ditawarkan untuk meningkatkan kepentingan manajer, yang pada gilirannya dapat tercermin dalam memaksimalkan kinerja perusahaan (Almuhdeki and Zeitun, 2012). Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha bekerja secara optimal dan tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Manajemen selalu berupaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan maka kekayaannya yang dimiliki sebagai pemegang saham akan meningkat, sehingga kesejahteraan pemegang saham akan meningkat pula.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, karena manajemen akan ikut merasakan manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil. Selain itu manajemen juga ikut menanggung kerugian apabila keputusan yang diambil oleh mereka salah.

Chen, Hexter, dan Hu (1993) menggunakan 500 perusahaan Fortune pada tahun 1976, 1980 dan 1984 untuk mempelajari hubungan antara kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan. Mereka menemukan bahwa Tobin's Q adalah fungsi kepemilikan manajerial. Ketika kepemilikan manajerial terletak di antara 0-5%, Tobin Q naik. Ketika kepemilikan manajerial meningkat sampai 12%, nilai

Tobin's Q mulai menurun dan ketika kepemilikan manajerial melebihi 12%, hasilnya berbeda-beda sangat sensitif terhadap sampel yang digunakan.

2.1.3.5 Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan kualitas yang ditunjukkan dari suatu hasil audit. Auditing adalah bentuk monitoring yang digunakan oleh perusahaan untuk menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) perusahaan dengan pemegang hutang (*bond holder*) dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976). Nilai auditing timbul karena auditing menurunkan pelaporan yang salah atas informasi akuntansi (Ardiati, 2005). Hasil auditing ini dicerminkan dalam laporan keuangan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Hasil audit tidak bisa diamati secara langsung sehingga pengukuran variabel kualitas audit maupun kualitas auditor menjadi sulit untuk dioperasionalkan. Untuk mengatasi permasalahan ini, para peneliti terdahulu kemudian mencari indikator pengganti dari kualitas auditor. Dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap kredibel untuk mengungkap profesionalismenya.

Kualitas kantor akuntan publik, dalam penelitian ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang mengatur Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 perlu mengatur kembali Jasa Akuntan Publik dengan mengganti Keputusan Menteri Keuangan dengan Peraturan Menteri Keuangan, Nomor: 17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik, tentang Jasa Akuntan

Publik pasal 1 Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Sehingga dalam penelitian ini jumlah patner (sekutu) yang mempunyai izin akuntan dalam badan usaha menjadi ukuran kualitas kantor akuntan publik yang menjadi sampel penelitian. Kualitas kantor akuntan publik dalam penelitian ini juga mengacu pada KAP *name* atau *audit brand name* yang tercermin dari kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) dan Organisasi Audit Asing (OAA). KAP yang mencantumkan nama KAPA atau OAA pada nama kantor, kepala surat, dokumen, dan media lainnya diasumsikan sebagai *big* KAP, setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Auditor eksternal dianggap lebih independen dibandingkan dengan auditor internal. Oleh karena itu, auditor eksternal mempunyai peran yang penting dalam kerangka *corporate governance*. Salah satu fungsi utama auditor eksternal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana yang seharusnya (*compliance*) dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang (Arifin, 2005). Secara prinsip auditor eksternal harus ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari calon yang diajukan oleh dewan komisaris berdasarkan usulan komite audit.

Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh dewan komisaris, direksi, dan stakeholders. Perusahaan harus menyediakan bagi auditor eksternal semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran,

ketaat-asasan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Para auditor eksternal harus memberitahu perusahaan melalui komite audit mengenai kejadian dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Tjager, 2003).

Kualitas jasa audit memiliki peranan penting untuk mengurangi asimetri informasi dan *agency problems* yang dihasilkan dari pemisahan kepemilikan dan kontrol dalam sebuah perusahaan. DeFond dan Francis (2005) dan Fan dan Wong (2005) berargumen bahwa kualitas audit merupakan elemen penting dari *corporate governance*, terlepas dari komplementer atau substitusi dari kualitas audit dan komponen lain dari *corporate governance*. Pemegang Saham ingin memaksimalkan laba atas investasi atau nilai saham mereka sedangkan manajer lebih tertarik pada *private consumption* sumber daya perusahaan dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Fooladi dan Shukor, 2012). Oleh karena itu, auditor eksternal dapat memberikan kontribusi pada upaya *corporate governance* dalam mengurangi masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham. Penelitian sebelumnya mendokumentasikan bahwa KAP *Big Four* memberikan kinerja kualitas audit yang lebih tinggi (Fuerman 2004).

2.2 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Kinerja juga merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang di analisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai prestasi kerja dalam periode tertentu. Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap laporan keuangan yang telah dianalisis karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Arifani, 2013).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kajola (2008) yang mengungkapkan bahwa kinerja perusahaan merupakan konsep penting yang langsung berhubungan dengan cara bagaimana sumber daya keuangan yang tersedia untuk organisasi itu digunakan secara bijaksana untuk mencapai tujuan perusahaan yang bisa memberikan peluang di masa depan agar perusahaan bisa berkembang. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai *ratio* (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.

Analisis laporan keuangan digunakan untuk memantau kemajuan suatu perusahaan. James dan John (2005) menyatakan bahwa agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya, analisis keuangan perlu melakukan

pemeriksaan atas berbagai aspek keuangan perusahaan. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut adalah rasio keuangan (*financial ratio*). Hal ini juga didukung oleh Ross dkk, (2009:78) yang menyatakan bahwa rasio merupakan cara untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan yang ada antara berbagai bagian informasi keuangan.

Berikut ini adalah beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Ang, 1997):

1. Rasio likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya.

2. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan standar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri.

3. Rasio profitabilitas

Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan penjualan, asset maupun laba bagimodal sendiri. Rasio profitabilitas dibagi menjadi enam antara lain: *gross profit margin* (GRM), *net profit margin* (NPM), *operating return on assets* (OPROA), *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE), *operating ratio* (OR).

4. Rasio solvabilitas (*Leverage*)

Financial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri 100%.

5. Rasio Pasar (*Market ratio*)

Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkandalam basis per saham. Rasio nilai pasar perusahaan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa yang akan mendatang. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, misalnya *price earning ratio (PER)*, *market-to-book ratio*, *Tobin's Q*, dan *price / cash flow ratio*.

Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian ini yaitu kinerja operasional perusahaan dan kinerja pasar. Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan sejauh mana keseriusannya menerapkan *good corporate governance*. Di dalam majalah SWA (2001) menyebutkan bahwa sebanyak 25 perusahaan peringkat teratas yang menerapkan *good corporate governance* dengan baik secara tidak langsung menaikkan nilai sahamnya. Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri, umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang akan berdampak terhadap kinerjanya. Kinerja operasi perusahaan diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan keuangannya. Untuk

mengukur kinerja operasional perusahaan biasanya digunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Rasio yang sering digunakan adalah ROE. Sedangkan Tobin's Q *ratio* atau dapat disebut juga rasio-Q mewakili kinerja pasar.

2.2.1 ROE (*Return On Equity*)

ROE (*Return on Equity*) adalah rasio laba bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri untuk mengukur tingkat hasil investasi pemegang saham (Weston dan Copeland, 1987:233). ROE dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih atau *net profit* terhadap total equity atau *equity value*. Nilai ROE yang semakin tinggi mengindikasikan tingkat hasil yang lebih baik kepada pemegang saham atas investasinya. Selain itu, nilai ROE yang tinggi menunjukkan penerimaan badan usaha atas investasi yang sangat baik dan manajemen biaya yang efektif. Semakin tinggi ROE menunjukkan semakin efisien perusahaan menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. ROE digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan atau efektivitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas (*shareholders' equity*) yang dimiliki oleh perusahaan.

Selama ini investor menilai kinerja dari suatu perusahaan dan menentukan nilai (*value*) perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan selama beberapa periode. Kemudian untuk menghitung kinerja fundamental dari perusahaan itu sendiri terdapat beberapa metode yang sering digunakan, antara lain *Price to Earning Ratio (PER)*, *Price to Book Value (PBV)*, *Return on*

Investment (ROI), Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA). Dalam penelitian ini menggunakan *Return on Equity (ROE)*. Metode-metode tersebut di atas memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kekurangan yang paling utama adalah metode-metode tersebut mengukur kinerja perusahaan berdasarkan tingkat pengembalian dari modal yang sudah dikeluarkan dan kelemahan penting dalam penggunaan rasio keuangan adalah karena laba yang dilaporkan tidak memasukan unsur biaya modal. Metode-metode tersebut tidak memperhitungkan biaya atas modal itu sendiri sehingga sulit untuk mengetahui apakah tercipta *value* atas modal yang sudah dikeluarkan investor.

Nilai (*value*) perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan dipasar. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan ke depan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. Karena nilai perusahaan memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. Para profesional diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris.

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Tobin's Q. Rasio ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh.

2.2.2 Tobin's Q

Tobin's Q merupakan ukuran penilaian yang paling banyak digunakan dalam data keuangan perusahaan. Nama Tobin's Q berasal dari James Tobin dari Yale University setelah dia memperoleh hadiah nobel. *Tobin's Q is defined as the ratio of market value of debt and equity of the firm to the replacement cost of the firm* (Nor et al.,1999). Dari pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa Tobin's Q merupakan rasio nilai pasar utang dan ekuitas perusahaan terhadap biaya penggantian perusahaan tersebut. Ada beberapa rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi yang paling baik adalah Tobin's Q. Menurut Sukamulja (2004) rasio Tobin's Q dapat menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti misalnya terjadinya perbedaan *cross sectional* dalam pengambilan keputusan investasi dan diversifikasi; hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan; hubungan antara kinerja manajemen dengan keuntungan dengan akuisisi dan kebijakan pendanaan, dividen, dan kompensasi.

Morck, dkk (dikutip dari Wulandari, 2006) dalam penelitiannya menggunakan Tobin's Q sebagai alat ukur kinerja perusahaan dengan alasan bahwa dengan penggunaan Tobin's Q, maka *market value* perusahaan dapat diketahui. *Market value* perusahaan mencerminkan keuntungan masa depan perusahaan seperti laba saat ini. Market value dipengaruhi oleh isi dari informasi asimetri, frekuensi atau *volume insider trading* dan likuiditas, sedangkan aliran laba tidak dipengaruhi oleh ketiga hal tersebut karena aliran laba dalam laporan keuangan konvensional tidak mengungkapkan variabel-variabel yang

mempengaruhi *market value*. Sehingga hasil tingkat pengembalian yang dilaporkan dapat berbeda dengan yang diperoleh investor. Nilai *market value* saham yang diperdagangkan juga akan mengalami perbedaan.

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan Tobin's Q tidak hanya memberikan gambaran tentang aspek fundamental, tetapi juga menggambarkan sejauh mana pasar menilai perusahaan dari berbagai aspek yang dapat dilihat oleh pihak luar, termasuk investor. Rasio Tobin's Q dapat mendeteksi prospek pertumbuhan dengan baik. Jika rasio-Q diatas satu maka investasi saham aktiva akan menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi dan hal tersebut akan merangsang investasi baru, sedangkan jika rasio-Q dibawah satu maka investasi dalam aktiva tidak menarik untuk dilakukan. Semakin besar nilai rasio Tobin's Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik pula dan memiliki *intangable asset* (aset tidak berwujud) yang semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi akan menyebabkan investor rela mengeluarkan pengorbanan lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Perusahaan dengan nilai Q yang lebih tinggi biasanya memiliki *brand image* perusahaan yang sangat kuat, sedangkan perusahaan yang memiliki nilai Q yang lebih rendah biasanya berada pada industri yang sangat kompetitif atau industri yang mulai mengecil (Brealey dan Myers, 2000).

2.3 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya,

sehingga beberapa poin penting dari hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan dasar dalam penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

2.3.1 Hexana Sri Lastanti (2004)

Lastanti meneliti hubungan antara struktur *corporate governance* dengan kinerja perusahaan dan reaksi pasar. Dalam penelitian tersebut digunakan struktur *corporate governance* berupa komposisi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi oleh nilai perusahaan (Tobin's Q) dan kinerja keuangan (ROA dan ROE). Hasil penelitian menyatakan terdapat hubungan positif signifikan antara independensi dewan komisaris dan Tobin's Q. Sementara variabel lain tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap Tobin's Q, ROA, ataupun ROE.

2.3.2 Sanda; Ahmadu; Aminu S. Mikaliu; dan Tukur Garba (2005)

Sanda *et al.* meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan di perusahaan Nigeria. Variabel independennya adalah ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan variabel dummy CEO ekspatriat. Variabel dependennya, yaitu ROA, ROE, dan Tobin's Q. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang tercatat di *Nigerian Stock Exchange* dengan total sampel 93 perusahaan periode 1996-1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA, ROE,

dan Tobin's Q. CEO ekspatriat berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE dan Tobin's Q.

2.3.3 Kajola, Sunday O (2008)

Kajola meneliti tentang empat struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan *return on equity*, ROE dan *profit margin*, PM. Variabel independen yang digunakan adalah empat struktur *corporate governance* yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan status CEO, sedangkan variabel dependennya adalah ROE dan PM. Alat analisis yang digunakan adalah *multiple regression* dan OLS. Penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di *Nigerian Stock Exchange* dengan total sampel 20 perusahaan selama periode 2000-2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE namun tidak signifikan terhadap PM, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berhubungan signifikan terhadap ROE maupun PM. Status CEO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE pada level 10% dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PM.

2.3.4 Filia Puspitasari dan Endang Ernawati (2010)

Puspitasari dan Ernawati meneliti tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang variabel - variabelnya terdiri dari ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan CEO ekspatriat ROA, ROE, dan Tobin's Q. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan

seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI yang konsisten mempublikasikan laporan keuangan dengan total sampel 112 perusahaan periode 2005-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA, ROE, dan Tobin's Q. CEO ekspatriat berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE dan Tobin's Q.

2.3.5 Djoko Suhardjanto dan Apreria Anggitarani (2010)

Suwardjanto, Apreria meneliti tentang macam pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dalam penelitiannya menggunakan proporsi komisaris independen, latar belakang *culture* atau *ethnic* presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi anggota komite audit, serta jumlah rapat komite audit. Variabel dependen yang digunakan kinerja keuangan perusahaan (diukur menggunakan CFROA). Kemudian variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan, *leverage* dengan alat analisisnya regresi berganda. Sampel yang digunakan yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 dengan total sampel 90 perusahaan industri jasa, keuangan, dan manufaktur termasuk pertambangan. Hasil penelitian mengungkapkan latar belakang *ethnic* presiden komisaris, jumlah rapat komite audit dan *leverage* signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sedangkan proporsi komisaris independen, ukuran perusahaan ditemukan secara statistik tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Proporsi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.6 Sawitri Sekaredi (2011)

Sawitri Sekaredi meneliti tentang mekanisme *corporate governance* yang variabel independennya terdiri dari kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diproksi dengan Tobin's Q dan CFROA. Tobin's Q digunakan untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan pasar dan CFROA sebagai pengukur kinerja berdasarkan operasional perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar, sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negatif signifikan. Komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negatif signifikan. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang konsisten terdaftar di perusahaan LQ45 dengan total sampel 18 perusahaan selama periode 2005-2009.

2.3.7 Qaiser Rafique Yasser, Harry Entebang dan Shazali Abu Mansor (2011)

Yasser *et al.* meneliti tentang hubungan antara empat struktur *corporate governance* yang penting terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROE dan PM di Pakistan. Variabel independennya adalah dewan komisaris, komisaris independen, dualitas CEO, dan komite audit. Alat analisis yang

digunakan adalah *multiple regression*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga struktur *corporate governance* (dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan PM, sedangkan dualitas CEO tidak memberikan hubungan yang signifikan terhadap ROE dan PM. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang tercatat di *Karachi Stock Exchange* dengan total sampel 30 perusahaan periode 2008-2009.

2.3.8 Noora Almudehki dan Rami Zeitun (2012)

Almudehki dan Zeitun (2012) meneliti tentang pengaruh perbedaan dimensi dari struktur kepemilikan dan kinerja perusahaan. Dimensi yang berbeda dari struktur kepemilikan yang juga menjadi variabel independen penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependennya, yaitu kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q, ROA, dan ROE. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 29 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di *Qatar Exchange* selama periode 2006-2011. Alat analisis yang digunakan adalah *General least regression (GLS)* untuk menguji hipotesis dan regresi linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan. Selain itu, kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan ROA dan ROE, sedangkan kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, ROE dan Tobin's Q. Di sisi lain, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Tobin's Q.

2.3.9 Mohammad Ahid Ghabayen (2012)

Mohammad Ahid Ghabayen meneliti tentang hubungan antara struktur *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan di Saudi Arabia. Variabel independennya adalah dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan komite audit independen, sedangkan variabel dependennya adalah ROA. Alat analisis yang digunakan adalah *multiple regression*. Penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang tercatat di *Saudi Arabia Stock Exchange* dengan total sampel 102 perusahaan berdasarkan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara dewan komisaris, komite audit, dan komite audit independen terhadap ROA, sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

2.3.10 Masood Fooladi dan Zaleha Abdul Shukor (2012)

Fooladi dan Shukor meneliti tentang hubungan karakteristik *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan di Malaysia. Variabel independen penelitian ini adalah komisaris independen, dualitas CEO, dewan komisaris, dan kualitas audit, sedangkan variabel kontrol menggunakan ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan *leverage*. Variabel dependen yang digunakan kinerja perusahaan yang diprosikan dengan Tobin's Q dan ROA. Alat analisis yang digunakan adalah *multiple regression*. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kualitas audit memiliki dampak positif dan signifikan pada kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin's Q. Dengan kata lain, perusahaan audit *Big Four* dapat

meningkatkan *return on asset* dan pelaku pasar juga mempertimbangkan kualitas audit sebagai struktur pengendali yang efisien dalam *corporate governance*. Dewan komisaris tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja yang diproksikan oleh Tobin's Q dan ROA. Sedangkan komisaris independen dan dualitas CEO berhubungan signifikan terhadap Tobin's Q namun tidak signifikan terhadap ROA. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q dan ROA. Umur perusahaan atau *age* dan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, namun tidak signifikan terhadap Tobin's Q. Penelitian ini menggunakan perusahaan *go public* yang tercatat dalam sembilan industri yang berbeda di Bursa Malaysia dengan total sampel 50% dari masing industri dan terkumpul 400 perusahaan dipilih secara acak dari laporan tahunan periode 2009.

2.3.11 Filip Fidanoski, Vesna Mateska, Kiril Simeonovski (2013)

Fidanoski *et al.* meneliti tentang relevansi *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan di Macedonia. Variabel independennya adalah dewan komisaris, komisaris independen, dan kualitas CEO, sedangkan variabel dependennya adalah ROA dan ROE. Alat analisis yang digunakan adalah OLS regression. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang tercatat di *National Bank of The Republic of Macedonia* dan di *Macedonian Securities Exchange Commission* dengan total sampel 60 perusahaan periode 2008-2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan dewan komisaris berpengaruh tidak

signifikan terhadap ROE. Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Kualitas CEO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE.

2.3.12 John D. Obradovich dan Amarjit Gill (2013)

Obradovich dan Gill meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan financial *leverage* terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q. Variabel independennya adalah dewan komisaris, financial *leverage*, ukuran perusahaan, komite audit, dan ROA. Alat analisis yang digunakan adalah OLS *multiple regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tobin's Q, sedangkan financial *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q. Komite audit dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang tercatat di *New York Stock Exchange* dengan total sampel 333 perusahaan periode 2009-2011.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 :

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Hexana Sri Lastanti (2004) "Hubungan Struktur <i>Corporate Governance</i> Dengan Kinerja Perusahaan	Komposisi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional, nilai	Regresi Berganda	(1) Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tobin's Q namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap ROA dan ROE.

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	dan Reaksi Pasar”	perusahaan (Tobin’s Q), kinerja keuangan (ROA dan ROE).		
2.	Sanda, Ahmadu, Aminu S. Mikaliu, & Tukur Garba (2005) “ <i>Corporate governance Mechanism and Firm Financial Performance in Nigeria</i> ”	Ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, variabel dummy CEO ekspatriat, ROA, ROE, dan Tobin’s Q.	Regresi berganda	(1) Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. (2) Komisaris independen berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja.
3.	Kajola Sunday O (2008) “ <i>Corporate Governance and Firm Performance: The Case of Nigerian Listed Firms</i> ”	Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, status CEO, ROE, PM	<i>Multiple regression</i> dan OLS	(1) Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE namun tidak signifikan terhadap PM (2) Komisaris independen tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja (3) Komite audit tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja
4.	Filia Puspitasari & Endang Ernawati (2010) “Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha”	Ukuran dewan komisaris, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan CEO ekspatriat, ROA, ROE, Tobin’s Q.	Regresi berganda	(1) Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja.. (2) Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja.
5.	Suhardjanto dan Apreria (2010) “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit	Komisaris independen, latar belakang kultur, komisaris utama, latar belakang pendidikan	Regresi berganda	(1) Proporsi komisaris Independen tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (2) Proporsi komite audit tidak berpengaruh

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan”	komisaris utama, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit, jumlah rapat komite audit, ukuran perusahaan, leverage, CFROA CFROA dan NPM.		signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
6.	Sawitri Sekaredi (2011) “Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”	Ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, komisaris independen, Tobin’s Q, CFROA	Regresi linier berganda	(1) Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. (2) Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja.
7.	Qaiser Rafique Yasser, Harry Entebang dan Shazali Abu Mansor (2011) “ <i>Corporate governance and firm performance in Pakistan: The case of Karachi Stock Exchange (KSE)-30</i> ”	Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dualitas CEO, ROE, PM	<i>Multiple regression</i>	(1) Ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (2) Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (3) Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan
8.	Noora Almudehki dan Rami Zeitun (2012) “ <i>Ownership Structure and Corporate Performance: Evidence From Qatar</i> ”	Kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional, Tobin’s Q, ROA, dan ROE.	Regresi linier dan GLS	(1) Kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan ROA dan ROE.
9.	Mohammad Ahid Ghabayen (2012)	Ukuran dewan komisaris,	<i>Multiple regression</i>	(1) Ukuran dewan komisaris tidak berhubungan

No.	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	<i>“Board Characteristics and Firm Performance: Case of Saudi Arabia”</i>	komisaris independen, komite audit, independen komite audit, ROA		signifikan terhadap kinerja (2) Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja (3) Komite audit tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja
10.	Masood Fooladi dan Zaleha Abdul Shukor (2012) <i>“Board of Directors, Audit Quality and firm performance: Evidence from Malaysia”</i>	Komisaris independen, dualitas CEO, dewan komisaris, kualitas audit, <i>age, leverage</i> , ukuran perusahaan Tobin’s Q dan ROA	<i>Multiple regression</i>	(1) Kualitas audit memiliki dampak positif dan signifikan pada kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA dan Tobin’s Q (2) Dewan komisaris tidak berhubungan signifikan terhadap kinerja baik ROA dan Tobin’s Q (3) Komisaris independen berhubungan signifikan terhadap Tobin’s Q namun tidak signifikan terhadap ROA
11.	Filip Fidanoski, Vesna Mateska, Kiril Simeonovski (2013) <i>“Corporate Governance and Bank Performance: Evidence From Macedonia”</i>	Ukuran dewan komisaris, Komisaris independen, Kualitas CEO, ROA, dan ROE	OLS regression	(1) Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (ROA) (2) Ukuran dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja (ROE) (3) Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja
12.	John Obradovich & Amarjit Gill (2013) <i>“The Impact of Corporate governance and Financial Leverage on The Value of American Firms”</i>	Ukuran dewan komisaris, Ukuran perusahaan, komite audit, ROA, Tobin’s Q.	OLS <i>multiple regression</i>	(1) Dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja (2) Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

Sumber: Berbagai Jurnal dan Penelitian Terdahulu

Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini diantaranya pada penelitian terdahulu belum banyak mengkaitkan kepemilikan manajerial dan kualitas audit terhadap kinerja perusahaan, terlebih kualitas audit yang masih sedikit jumlahnya. Penelitian yang membahas tentang masalah kualitas audit terhadap kinerja perusahaan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Masood Fooladi dan Zaleha Abdul Shukor (2012). Hasil penelitian menunjukkan kualitas audit memiliki dampak positif dan signifikan pada kinerja perusahaan yang diprosikan oleh ROA dan Tobin's Q. Sehingga variabel ini cukup layak untuk dimasukkan dalam model.

Penelitian ini variabel yang digunakan sebagai variabel independen adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar (Klapper dan Love, 2002; Black dkk. 2003) dan *Return On Equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan (Klapper dan Love, 2002). Alasan lain pemilihan variabel-variabel tersebut adalah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, variabel-variabel tersebut telah diuji tetapi dalam kurun waktu yang berbeda-beda dan diuji dengan variabel-variabel yang berbeda-beda pula. Penelitian ini juga menggunakan periode waktu dan sampel penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil yang akan diperoleh nantinya dapat mendekati hasil atau berbeda hasil dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen yang berupa kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar (Klapper dan Love, 2002; Black dkk. 2003) dan *Return On Equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan (Klapper dan Love, 2002). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini berupa dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kualitas audit.

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan berbagai penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Dewan komisaris dalam pernyataan KNKG (2006) merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan praktik *corporate governance*. Dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan, khususnya dalam memonitor manajemen puncak.

Semakin besar ukuran dewan komisaris maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Kajola, 2008; Chang & Duta, 2012). Berdasarkan teori keagenan, perusahaan besar membutuhkan dewan komisaris yang lebih besar untuk

mengontrol dan memonitor tindakan manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Fidanoski *et al.*, (2013) membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang juga serta merta menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar meningkatkan kinerja perusahaan dalam membangun hubungan dengan lingkungan eksternal, menyediakan sumber daya untuk operasional perusahaan. Semakin besar kebutuhan untuk efektivitas hubungan eksternal, maka semakin besar ukuran dewan komisaris yang diperlukan.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menemukan hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Klapper dan Love, 2002; Hermalin & Weisbach, 2003; Haniffa & Hudaib, 2006; Wardhani 2007; Kajola, 2008)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut.

H1a : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)

H1b : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perusahaan

Karakteristik dewan komisaris selanjutnya adalah mengenai ukuran komisaris independen (*Board independence*). Bhagat dan Bernard (2001) berpendapat bahwa terdapat suatu kepercayaan tradisional mengenai komisaris

independen yang menjelaskan bahwa tugas utama seorang komisaris independen adalah memonitoring manajemen karena komisaris yang berasal dari dalam perusahaan dipandang sebagai perangkat yang digunakan untuk melindungi manajemen.

Semakin besar komisaris independen dapat mengurangi masalah keagenan karena komisaris independen lebih efektif dalam melakukan *controlling* dan *monitoring* kegiatan oportunistik manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini dikarenakan kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Baysinger dan Butler (1985) menunjukkan bahwa direktur non-eksekutif memberikan kinerja yang lebih baik bagi perusahaan. Sesuai dengan teori Watts dan Zimmerman (1986) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin efektif peranan komisaris independen di dalam melaksanakan fungsi monitoring terhadap perilaku oportunistik manajemen. Perilaku oportunistik manajemen yang diawasi dengan baik oleh komisaris independen akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Caylor (2004); Yasser et al (2011) dan Erkens *et al.* (2012) yang dalam penelitiannya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara komisaris independen dan kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut.

H2a : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)

H2b : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)

2.4.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Peran utama dari Komite audit adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Wild, 1996). Cadbury Committee menyarankan agar komite audit harus memiliki minimal tiga anggota. Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

Beberapa peneliti berpendapat bahwa semakin besarnya ukuran komite audit menjadikan anggota komite audit bertugas lebih terampil sehingga dapat meningkatkan pelaporan keuangan perusahaan (Kajola, 2008). Klein (2002) menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang lebih besar menurunkan manajemen laba karena adanya hubungan positif antara ukuran komite audit dan kinerja perusahaan.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sam'ani (2008), Yasser et al (2011), dan Obradovich & Gill (2013) yang

menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut.

H3a : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)

H3b : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan

Selain kepemilikan institusional, mekanisme yang dapat mengatasi masalah keagenan adalah dengan meningkatkan proporsi kepemilikan manajerial (Jensen & Meckling, 1976). Dengan mengakselerasi kepemilikan manajerial, diharapkan manajer dapat akan termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham yang juga dirinya sendiri. Definisi kepemilikan manajerial adalah terdapatnya anggota dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki saham pada perusahaan tempat mereka mengelola dan mengawasi perusahaan yang bersangkutan.

Dalam pengelolaan perusahaan, motivasi yang berbeda antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham (*owners-manager*) dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham (*nonowners-manager*) akan mempengaruhi perilaku manajemen laba. Oleh karena itu struktur *corporate governance* melalui

kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menekan kemungkinan perilaku manajer dalam melakukan *earnings management*, dan sebaliknya.

Di samping itu, kepemilikan manajerial yang dapat meyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen, akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham yang juga dirinya sendiri, sehingga akan menaikkan kinerja perusahaan. Semakin tinggi proporsi kepemilikan manajerial, semakin tinggi pula kinerja perusahaan yang akan dicapai.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yermack (1996), Agrawal (1996), Jelinek dan Stuerke's (2009), Almudehki dan Zeitun (2012) menemukan hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut.

H4a : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)

H4b : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)

2.4.5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Kinerja Perusahaan

Audit merupakan sebuah elemen penting dari pasar modal yang efisien. Hal tersebut dikarenakan audit dapat meningkatkan kredibilitas informasi keuangan baik secara langsung yang dapat mendukung praktik *corporate governance* melalui pelaporan keuangan yang disajikan secara transparan (Francis

et al, 2003 dan Sloan, 2001 dalam Che Haat, 2008). Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang transparan akan mempengaruhi alokasi sumber daya perusahaan (SEC, 2000 dalam Che Haat, 2008). Kualitas audit selain ditentukan oleh faktor tim audit juga ditentukan oleh pengalaman teknis dan pengalaman dalam industri, responsif terhadap kebutuhan klien, dan komunikasi yang baik dengan klien (Carcello *et. al.*, 1992). Oleh karena itu, jika suatu perusahaan diaudit oleh salah satu dari perusahaan KAP *Big4* dan kualitas audit memenuhi standar kualitas yang diterima, maka kinerja perusahaan diharapkan akan lebih baik serta pelaporan keuangan akan lebih transparan.

Secara teoritis, kantor akuntan publik yang besar dengan investasi yang lebih besar dalam modal reputasi akan lebih meminimalkan kesalahan dalam pemeriksaan laporan keuangan melalui “*auditor reputation effects*” (DeAngelo, 1981; Betty, 1989 dalam Che Haat, 2008). Sebuah perusahaan audit yang besar cenderung untuk menyediakan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak kekayaan yang dipertaruhkan dalam perusahaan audit besar. Perusahaan juga akan mengalami kerugian yang lebih besar melalui kerusakan reputasi jika kualitas audit tidak memenuhi standar kualitas yang diterima (Che Haat, 2008).

Dalam literatur *agency* dan *contracting* menyatakan bahwa semakin tinggi biaya keagenan (biaya konflik) maka semakin besar tuntutan terhadap kualitas audit yang lebih tinggi baik oleh manajer maupun pemegang saham (Watts dan Zimmerman, 1986). Dalam teori *contracting*, akuntansi berperan penting dalam pembuatan kontrak dan melakukan monitoring. Fungsi auditor adalah sebagai

pihak yang memberikan kepastian terhadap kewajaran atas laporan keuangan sebagai cerminan dari kinerja perusahaan.

Pernyataan ini didukung juga oleh Fooldadi dan Shukor (2012) dalam penelitiannya bahwa perusahaan audit *Big Four* dapat meningkatkan *return on asset* dan pelaku pasar juga mempertimbangkan kualitas audit sebagai struktur pengendali yang efisien dalam *corporate governance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

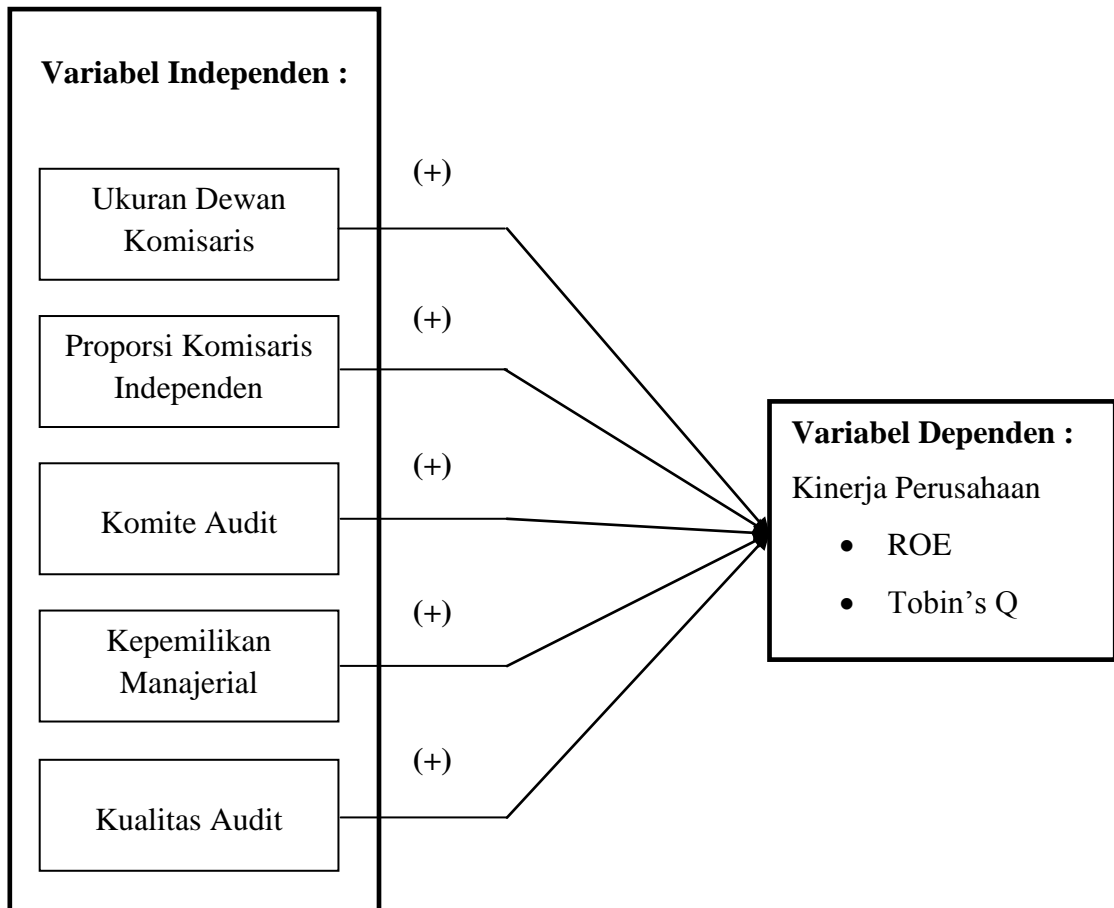
H5a: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)

H5b: Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini dan dapat digambarkan pada gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Hexana Sri Lastanti (2004), Sanda, Ahmadu, Aminu S. Mikaliu, & Tukur Garba (2005), Kajola Sunday O (2008), Sam'ani (2008), Filia Puspitasari & Endang Ernawati (2010), Suhardjanto dan Apreria. (2010), Sawitri Sekaredi (2011), Qaiser Rafique Yasser, Harry Entebang dan Shazali Abu Mansor (2011), Mohammad Ahid Ghabayen (2012), Masood Fooladi dan Zaleha Abdul Shukor (2012), Filip Fidanoski, Vesna Mateska, Kiril Simeonov Ski (2013), John Obradovich & Amarjit Gill (2013)

2.5 Hipotesis

Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

H1a : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)

- H1b : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)
- H2a : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)
- H2b : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)
- H3a : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)
- H3b : Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)
- H4a : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)
- H4b : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)
- H5a : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROE)
- H5b : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Tobin's Q)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

1. Variabel dependen

Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen (variabel bebas). Variabel dependen penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan *Return On Equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan dan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar.

2 Variabel Independen

Variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Variabel Independen penelitian ini adalah struktur *corporate governance* yang diukur dengan menggunakan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kualitas audit.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, berikut adalah variabel operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini.

a. Variabel dependen

1. Kinerja Perusahaan

Dalam penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin's Q sebagai ukuran penilaian pasar (Klapper dan Love, 2002; Black dkk. 2003) dan *Return On Equity* (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional perusahaan (Klapper dan Love, 2002).

Peneliti menyesuaikan rumus tersebut dengan kondisi transaksi keuangan perusahaan-perusahaan manufaktur di Indonesia. Dengan demikian, rumus yang digunakan untuk Tobin's Q menggunakan rumus sebagai berikut (Klapper dan Love, 2002; Black dkk. 2003):

$$\text{Tobin's Q} = (\text{MVE} + \text{DEBT})/\text{TA}$$

Dengan,

MVE : *market value of equity* (nilai pasar ekuitas), yaitu harga penutupan saham di akhir tahun buku x banyaknya saham biasa yang beredar.

DEBT : total hutang, yaitu (hutang lancar-aktiva lancar) + nilai buku sediaan + utang jangka panjang.

TA : total aktiva atau total aset

ROE dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Ridwan S. Sundjaja dan Inge Barlian (2003:146):

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total equity}}$$

b. Variabel Independen

1. Ukuran dewan komisaris

Dewan Komisaris adalah fungsi dari perusahaan yang berperan melakukan supervisi terhadap dewan direksi (*Forum for corporate governance in Indonesia*, 2000). Variabel penelitian ini dengan mengukur banyaknya ukuran dewan komisaris yang terdapat pada perusahaan.

$$Ukuran\ dewan\ komisaris = \sum \text{Komisaris Internal} + \sum \text{Komisaris Eksternal}$$

2. Proporsi komisaris independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.

$$\text{Proporsi komisaris independen} = \frac{\sum \text{komisaris independen}}{\sum \text{keanggotaan dewan komisaris}} \times 100\%$$

3. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab membantu auditor dalam mempertahankan independensi dari manajemen (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000). Variabel ukuran komite audit ini diukur berdasarkan jumlah komite audit yang terdapat pada profil perusahaan.

4. Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan (Diyah dan Erman, 2009). Variabel ini digunakan untuk mengetahui manfaat kepemilikan manajemen dalam mekanisme pengurangan konflik agensi (Haruman, 2008). Dalam penelitian ini kepemilikan manajemen diukur sesuai dengan persentase jumlah saham yang proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009).

5. Kualitas audit

Kualitas audit diukur dengan menggunakan proksi skala auditor yang diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu dengan angka 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP non *Big4* (kualitas auditnya rendah), sedangkan dengan angka 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP *big4* (kualitas auditnya tinggi) (Che Haat, et al. 2008). Perusahaan audit Big4 (KAP *Big4*) sampai saat ini yaitu:

1. *Deloitte Touche Tohmatsu*, dengan partner di Indonesia yaitu: KAP Osman Bing Satrio.
2. *Price Water House Coopers* (PWC), dengan partner di Indonesia yaitu: KAP Haryanto Sahari dan rekan.
3. *Ernst and Young*, dengan partner di Indonesia yaitu: KAP Purwantono, Sarwoko, Sandjaja.

4. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) Internasional*, dengan partner di Indonesia yaitu: KAP Sidharta, Widjaja.

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No.	Nama Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran	Satuan
1.	Ukuran Dewan komisaris	Jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan	UDK = banyaknya ukuran (jumlah) dewan komisaris di dalam perusahaan	Orang
2	Proporsi dewan komisaris independen	Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan, komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali,serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi perusahaan	$\text{PDKI} = \frac{\sum \text{komisari independen}}{\sum \text{keanggotaan dewan komisaris}} \times 100\%$	Persentase atau desimal
3.	Komite audit	Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat <i>opportunistic</i> manajemen yang melakukan manajemen laba (<i>earnings management</i>) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.	KA = Jumlah orang komite audit yang ada pada perusahaan	Orang

4	Kepemilikan Manajerial	Persentase kepemilikan saham oleh direksi, manajemen, komisaris maupun setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan	KEPMAN = Persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen atau Persentase antara saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan banyaknya saham yang beredar	Persentase atau desimal
5.	Kualitas Audit	Kualitas audit yang diukur dengan ukuran eksternal auditor sebagai karakteristik tata kelola eksternal CG	AUDITOR = Diukur dengan variabel dummy, 0 jika perusahaan diaudit oleh KAP non <i>Big4</i> , sedangkan 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP <i>Big4</i>	Nominal
7.	Return on equity (ROE)	Ukuran kinerja operasional perusahaan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan	$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total equity}}$	Rasio
6.	Tobin's Q	Ukuran penilaian pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan	$\text{Tobin's Q} = (\text{MVE} + \text{DEBT})/\text{TA}$	Rasio

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen pada periode 2011-2013.
3. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data mengenai dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, komite audit serta kualitas audit (*Big4/non Big4*).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian yang berdasarkan pada prosedur analitik yang menggunakan pengolahan data dengan aplikasi software SPSS.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari situs BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2011-2013 (www.idx.co.id). Selain itu, penelitian ini menggunakan data mengenai laporan keuangan perusahaan yang dimuat di ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*) pada tahun 2011-2013.

3.4 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dan diambil dari berbagai literatur, seperti mencari referensi dari buku, jurnal, artikel, internet, dan lain sebagainya. Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari ICMD, website BEI (Bursa Efek Indonesia) www.idx.co.id, serta berbagai macam literatur lainnya.

3.5 Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi berganda, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan perhitungan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

maksimum, minimum, range, sum, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006).

3.5.2 Model Regresi

Penelitian ini menggunakan analisis statistik regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Uji regresi berganda digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis analisis regresi berganda dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan lima variabel independen yang mempengaruhi satu variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_a = a + \beta_1 UDK + \beta_2 PDKI + \beta_3 KA + \beta_4 KEPMAN + \beta_5 AUDITOR + e$$

$$Y_b = a + \beta_1 UDK + \beta_2 PDKI + \beta_3 KA + \beta_4 KEPMAN + \beta_5 AUDITOR + e$$

Keterangan :

Y_a = Kinerja perusahaan dengan ROE

Y_b = Kinerja perusahaan dengan Tobin's Q

UDK = Ukuran dewan komisaris

$PDKI$ = Proporsi dewan komisaris independen

KA = Ukuran komite audit

$KEPMAN$ = Persentase kepemilikan manajerial

$AUDITOR$ = Kualitas audit

a = Konstanta β = Koefisien regresi e = Koefisien error

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kelayakan dari model regresi. Ghozali (2006) menyatakan bahwa uji asumsi

klasik terdiri atas uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.5.3.1 Uji Multikolinearitas

Uji ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yaitu (Ghozali, 2006):

1. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Analisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 90), maka hal ini merupakan indikasi multikolinearitas.
 - a. Multikolinearitas dapat dilihat dari:
 - b. Nilai *Tolerance* dan lawannya.
 - c. Variance Inflation Factor (VIF)

Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena $VIF = 1/Tolerance$. Nilai cutoff yang umum digunakan untuk menunjukkan multikolinearitas yaitu nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 .

3.5.3.2 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi maka ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul ketika observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan lainnya (Ghozali, 2006).

Pengujian dengan autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson (DW). Suatu model regresi yang tidak terkena autokorelasi menunjukkan nilai DW berada diantara nilai d_u dan $4-d_u$ (Ghozali, 2006). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2

Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson (DW)

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4-d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4-d_u$

Sumber: (Ghozali, 2006)

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka terjadi Homoskedastisitas. Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006):

Lihat grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Dasar analisis:

- a. Jika terdapat pola tertentu (seperti titik-titik yang akan membentuk pola teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit)), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak terdapat pola yang jelas (titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.3.4 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau nilai residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan (Ghozali, 2006):

1. Analisis Grafik

Untuk melihat normalitas residual yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Metode yang lebih handal dalam melihat normalitas yaitu dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006).

2. Uji Statistik

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung dengan:

$$Z_{\text{skewness}} = \frac{\text{Skewness}}{\sqrt{6/N}}$$

$$Z_{\text{kurtosis}} = \frac{\text{Kurtosis}}{\sqrt{24/N}}$$

Jika nilai Zhitung > Ztabel, maka distribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

3. Uji Statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S)

Uji statistik ini berguna untuk menghindari adanya hasil yang menyesatkan dengan menggunakan grafik saja, maka perlu dilengkapi dengan adanya uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Pengujian menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dilakukan dengan menentukan hipotesis terlebih dahulu, yaitu:

Hipotesis Nol (H₀) : data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif (H_A) : data tidak terdistribusi secara normal

Pengambilan keputusan dari uji non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) ini dengan melihat nilai probabilitas tingkat signifikansi data residual. Jika nilai probabilitas < $\alpha = 0,05$ maka variabel tidak terdistribusi secara normal, sedangkan jika nilai probabilitas > $\alpha = 0,05$ maka variabel terdistribusi secara normal yang berarti bahwa H_A ditolak (Ghozali, 2006).

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian R² digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, sehingga apabila

nilai R² yang kecil berarti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Jika nilai yang mendekati satu berarti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t (*t-test*))

Penelitian ini menggunakan uji t karena digunakan untuk menguji tingkat signifikansi seberapa jauh variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian yaitu:

- a. Jika terdapat nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak, hal ini berarti bahwa koefisien regresi tidak signifikan. Secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika terdapat nilai signifikan $\leq 0,05$ maka koefisien regresi bersifat signifikan dan secara parsial variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).

3.5.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f (*f-test*))

Penelitian ini menggunakan uji F karena digunakan untuk menguji hipotesis yang menunjukkan apakah semua variabel independen dalam penelitian secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikansi 0,05 atau $\alpha=5\%$. Dalam pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pengujian yaitu:

- a. Jika terdapat nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka koefisien regresi bersifat signifikan dan simultan variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika terdapat nilai signifikansi $> 0,05$ maka berarti bahwa secara simultan variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006).